

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

SDGs (*Sustainable Development Goals*) memiliki poin penting untuk mengatasi kemiskinan, mengamankan planet bumi, dan menciptakan kesejahteraan manusia (Harliadi, 2016: 1). SDGs memiliki prioritas untuk membangun kesejahteraan bersama, membicarakan lingkungan sosial kelompok secara berkelanjutan, fokus pada kualitas lingkungan dan pemerataan, juga terwujudnya tata kelola sebagai bekal di masa mendatang (Saputra, E., dkk., 2021: 57). SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 sasaran yang dapat tercapai pada tahun 2030 (Zuhriyah, T., 2023: 561-563).

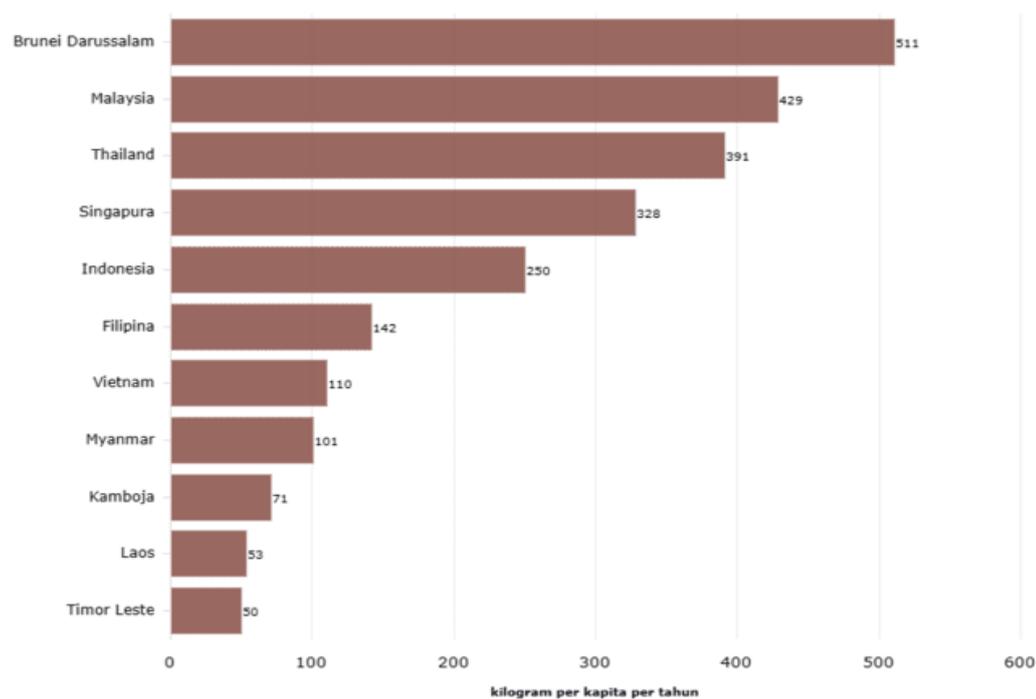
Salah satu tujuan dari SDGs terkait dengan pilar pembangunan lingkungan yaitu sampah. Jika dikaitkan dengan SDGs maka sampah masuk ke dalam empat tujuan dari 17 tujuan SDGs, yakni: (1) SDGs 3.9 (mengurangi jumlah penyakit dan kematian karena zat kimia dan polusi); (2) SDGs 6.3 (penggunaan kembali yang aman, mengolah air sampah, dan peningkatan kualitas air); (3) SDGs 11.6 (mengurangi akibat buruk pada lingkungan); dan (4) SDGs 12.4 (tanggung jawab sosial pada pengelolaan zat kimia dan limbah) (Zuhriyah, T., 2023: 562). Sampah merupakan permasalahan lingkungan yang turut menjadi permasalahan publik karena berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat akibat pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan sebagai sumber penyakit (Agustari, 2023: 2).

Masalah pengelolaan sampah telah menjadi masalah global yang serius pada abad ke-21 karena semua negara telah menunjukkan komitmen untuk mengatasinya, terutama ketika merumuskan kebijakan terkait kesehatan masyarakat dan lingkungan (Okoli et al., 2020). Pada tahun 2050, sampah global ditaksir mengalami kenaikan menjadi 3,4 miliar dari 2,01 miliar ton di tahun 2016, jika tidak dilakukan tindakan penanganan (Kaza et al., 2018). Hal ini mendorong pengelolaan sampah penting dilakukan di wilayah perkotaan, terutama di negara yang berpendapatan rendah dan menengah (Hooornweg & Bhada-Tata, 2012).

Salah satu contohnya pengelolaan masalah sampah di Rivers State, Nigeria, yang berjalan tidak efektif, karena tidak adanya dominasi organisasi, buruknya manajemen, dan kurangnya anggaran. Pihak kontraktor selaku pengelola sampah tidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingga pengangkutan sampah seringkali mengalami keterlambatan dan berdampak pada berserakannya sampah di jalan bahkan masuk ke dalam aliran air sungai. Selain itu, terdapat praktik pembuangan sampah di sembarang tempat yang dibiarkan begitu saja, sarana dan prasarana seperti truk pengangkut sampah yang tidak layak jalan, serta SDM sebagai petugas kebersihan tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki keahlian bahkan tidak memperhatikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (Okoli, et.a, 2020).

Kota New Delhi, India, memiliki permasalahan pada fasilitas pengelolaan sampah yaitu kekurangan waktu, kekurangan ruang, dan kekurangan fasilitas. Permasalahan tersebut juga dipengaruhi dan dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu proses kebijakan berjalan (Kala, et.al., 2020: 4-7). Permasalahan yang sama juga dihadapi Kota Shenzhen, Cina, dalam melakukan pengelolaan

sampah disebabkan oleh pendanaan yang tidak mencukupi, teknologi yang primitif, dan sistem administrasi yang tidak efisien (Bao, Z. & Lu, W., 2020: 1-7). Pengelolaan sampah yang tepat penting dilakukan untuk memastikan keamanan agar tidak memberikan dampak buruk secara berkelanjutan bagi kelangsungan hidup manusia (Aslam, et.al., 2020: 3).



Gambar 1.1 Negara Produsen Sampah per Kapita di Asia Tenggara  
Sumber: Meijer et.al. (2021)

Dari grafik tersebut, menyebutkan bahwa Indonesia tengah dihadapkan pada permasalahan sampah dan menempati posisi kelima dari 11 negara di Asia Tenggara sebagai negara produsen sampah per kapita tertinggi (Meijer, et al., 2021). Berdasarkan laporan SIPSN KLHK (Sistem Informasi Pengendalian Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tahun 2022, volume tumpukan sampah di Indonesia diperkirakan 68,7 juta ton/tahun dengan mayoritas sampah sisa makanan (41,55%); sampah plastik (18,55%); sampah kayu

(13,27%); sampah kraton (11,04%)' sampah logam (2,86%); sampah kain (2,54%); sampah karet/kulit (1,68%); dan sampah lainnya (6,55%).

Perkembangan industrialisasi di Indonesia memang memberikan perubahan positif untuk kehidupan ekonomi tetapi tanpa disadari dapat memberikan perubahan negatif untuk lingkungan karena menghasilkan sampah padat ataupun cair dalam jumlah besar (Lu, We., et.al., 2020: 2). Kehidupan industrialisasi turut mempengaruhi permasalahan sampah yang menjadi permasalahan pokok dan belum dapat teratasi secara optimal di kota-kota besar di Indonesia misalnya limbah pabrik (Rahman, 2019: 89). Tumpukan sampah dan limbah hasil pabrik akan berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan manusia sehingga dibutuhkan langkah penanganan yang tepat (Sekarsari, R. W., dkk., 2020: 19-20). Wardani (2022: 4-5) mendukung hal tersebut melalui penelitiannya yang menunjukkan bahwa kegiatan industri, menghasilkan limbah pabrik yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat karena dampak negatifnya.

Mayoritas TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di Indonesia dalam pengelolaan sampah masih belum mencapai standar *sanitary landfill*. *Sanitary landfill* adalah cara memperlakukan sampah melalui pembuangan sampah ke tempat cekung, memadatkan, lalu ditimbun dengan tanah (Sudrajat, 2022: 423). Sebaliknya, *open dumping*, sistem pengelolaan sampah tanpa perlakuan yaitu dibuang begitu saja dan berdampak pada tingginya sampah di TPA yang berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan karena tingginya gas metana (Ermilinda dkk, 2022: 3-4). Air lindi dari sampah organik dapat memberikan efek buruk pada sumber air berdasarkan artikel “Bom Waktu Sampah” fenomena ini

disebut sebagai *boomerang effect*, tindakan manusia akan berdampak pada manusia (Purnaweni, 2017).

Artikel “Bom Waktu Sampah” (Purnaweni, 2017) menunjukkan bahwa keadaan masyarakat yang masih menganggap remeh permasalahan sampah dan tidak menjadikan sampah sebagai masalah yang gawat penanganan, menggambarkan kondisi yang selaras. Kebanyakan dari masyarakat, hanya mengandalkan peran petugas sampah tanpa disertai dengan kesadaran dan partisipasi aktif untuk turut serta memerangi permasalahan sampah. Paradigma lama pengelolaan sampah, Angkut-Kumpul-Buang, masih berkembang di masyarakat sehingga, diperlukan implementasi paradigma baru yaitu menjadi 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Perubahan paradigma baru ini mampu meminimalkan timbulan dan dampak sampah bagi lingkungan sehingga kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengimplementasikan paradigma baru pengelolaan sampah.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Operasionalisasinya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik sebagai regulasi turunan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang metodis, mencakup semua hal yang berkelanjutan, serta melibatkan penanganan dan pengurangan sampah. Pemerintah dan pemerintah

daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sampah dengan cara meminimalkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan tetap mematuhi undang-undang, termasuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan dengan baik dan berkelanjutan (Daeni dkk., 2021: 6-7).

Melalui peraturan daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota, berkomitmen untuk melakukan pengelolaan sampah. Hal tersebut diimplementasikan salah satunya di Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Jambi. Pengelolaan sampah di Jambi dipengaruhi oleh faktor penghambat berupa lokasi TPS tidak strategis karena berada di pinggiran sungai, kurangnya sarana pengelolaan sampah yang memadai, dan keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurangnya sosialisasi (Reta dkk., 2020: 8-17). Permasalahan hambatan pada implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah juga terjadi di Kota Mojokerto melalui Bank Sampah sebagai program dari Pemerintah Kota Mojokerto belum berjalan secara optimal karena pemerintah setempat belum mendukung kelancaran program yang dilaksanakan (Firdaus dkk., 2022: 60-63).

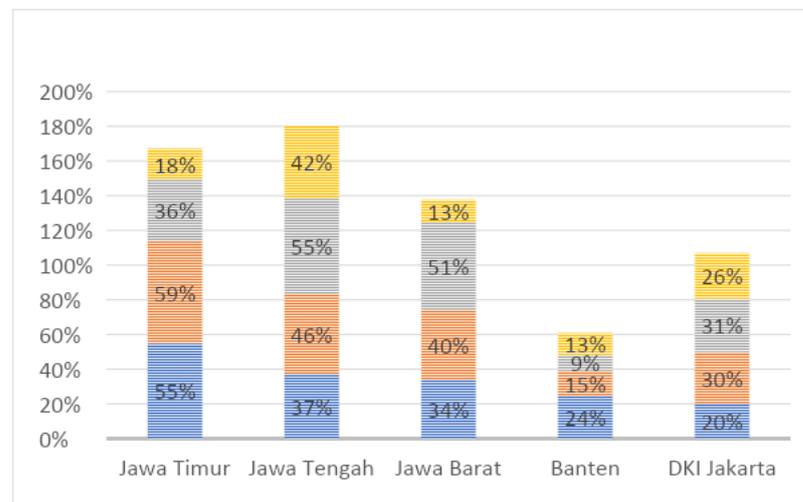
Implementasi pengelolaan sampah jelas membutuhkan komunikasi, sosialisasi, dan pembinaan oleh DLH kepada pemerintahan setempat sehingga terdapat kejelasan instruksi dalam pengelolaan sampah. Selain itu, juga diperlukan kuantitas pengelola sampah yang tepat, proses rekrutmen pegawai yang dilaksanakan sesuai SOP, serta terdapat SOP dan struktur kelembagaan pengelola sampah yang jelas sebagai pedoman pelayanan pengelolaan sampah (Amjah dkk., 2022: 10). Daya tampung dari TPA juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan

sampah untuk menghadapi kelebihan daya tampung sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan optimal (Putranto dkk., 2023: 3-4).

Proses implementasi kebijakan yang terpenting yaitu menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan yang tercermin melalui tepat kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses (Nugroho, 2021: 51-53). Lituhayu dkk. (2022: 16-20) mengungkapkan bahwa dalam ketepatan implementasi penerimaan bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantar Kawung, Brebes, belum mencapai tepat kebijakan karena bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) tidak berhasil mencapai tujuan untuk diberikan kepada anak putus sekolah. Ketepatan kebijakan membutuhkan perumusan yang berdasarkan pada ciri gejala yang akan diselesaikan dan apakah lembaga yang berwenang membuat kebijakan tersebut. Ketepatan kebijakan nyatanya harus memiliki kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan dari program yang diimplementasikan misalnya meningkatkan partisipasi masyarakat (Mitasari, 2023: 39).

Djumiarti dkk. (2022: 11) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Pantai Ujungnegero, Batang, belum tepat lingkungan karena dalam pengembangannya terdapat aspek yang kurang membantu program sapta pesona yaitu unsur kebersihan berpengaruh terhadap aspek lain juga merugikan wilayah konservasi karena sampah dan pantai kotor. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Donald J. Calista (Nugroho, 2021: 52-53) yang menyatakan bahwa lingkungan eksternal kebijakan memainkan peran penting dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan.

Sama halnya dengan pengelolaan sampah, ketepatan implementasi kebijakan harus memperhatikan lima indikator implementasi. Tidak hanya dampak negatif yang berkepanjangan, tetapi juga masalah urgen yang harus ditemui jalan keluarnya (Mitasari, 2023: 34). Namun, dalam implementasinya sering kali dapat dipengaruhi oleh faktor penghambat seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik; struktur dan sasaran; juga sumber daya yang mempengaruhi timbulan sampah dan tidak tercapainya lima indikator ketepatan implementasi (Abiyu, 2023: 23).



Gambar 1.2 Grafik Rata-Rata Timbulan Sampah di Indonesia Tahun 2019-2022  
Sumber: SIPSN KLHK (2022)

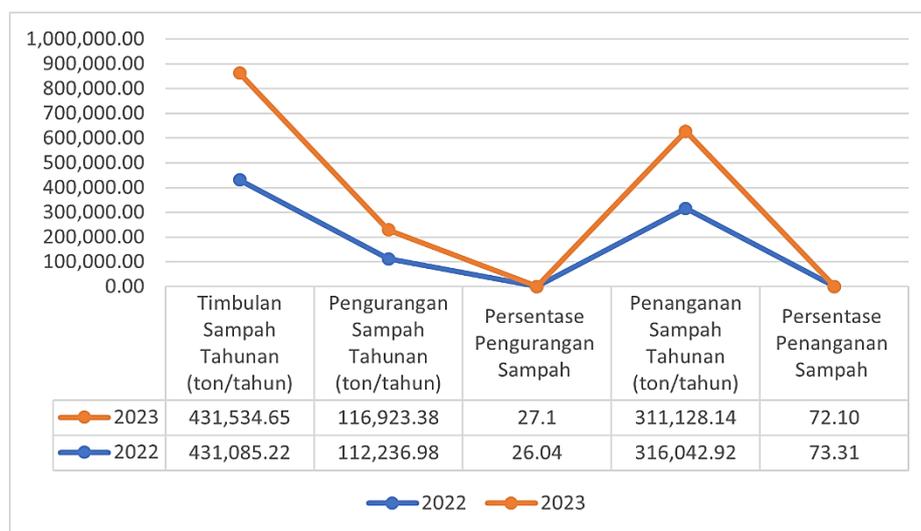
Dari grafik tersebut, Jawa Tengah menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan produksi timbulan sampah tertinggi di Indonesia. Artinya, permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Tengah sudah menjadi masalah serius dan masuk ke dalam tahap darurat penanganan (Daeni, dkk., 2021: 1-2). Menurut Syafruddin, Pakar Lingkungan Universitas Diponegoro, permasalahan ini membutuhkan kerja sama dan solidaritas terutama dari pemerintah dan masyarakat melalui penanaman pengetahuan dan nilai-nilai budaya untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah guna menanggulangi produksi timbulan

sampah (Jatengprov, 2019). Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang terdapat di RPJMD Jawa Tengah Tahun 2021-2026 bahwa timbulan sampah pada proses penanganan dan pengelolaannya belum terlayani 100% pengangkutan. Timbulan sampah terjadi karena peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan urbanisasi yang disertai dengan perubahan pola konsumsi manusia (Aslam, dkk., 2020: 5-10).

Penanganan permasalahan sampah telah menjadi isu utama yang sedang dihadapi Kota Semarang karena harus cepat ditangani (Novitayanti, dkk., 2020: 1-2). Pemerintah melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai langkah penanganan masalah tersebut.

Pentingnya pengelolaan sampah di Kota Semarang secara tepat perlu dilakukan mengingat usia operasi dan keterbatasan daya tampung TPA Jatibarang sebagai pusat pembuangan sampah (Febriyanti & Suryaningsih, 2018: 5-9). TPA Jatibarang berdiri sejak 1993 dengan luas lahan 46.183 Ha, dimana 27.7098 Ha atau sekitar 60% digunakan sebagai lahan limbah dan 18.4738 Ha atau sekitar 40% digunakan untuk kolam lindi (Pramesti, dkk., 2023: 2-10). Penelitian yang dilakukan oleh (Putranto, 2023: 5) menyebutkan bahwa daya tampung TPA Jatibarang yaitu 900 ton per hari tetapi, produksi sampah Kota Semarang hingga pembuangan akhir mencapai 1.270 ton per hari, artinya TPA Jatibarang mengalami

kelebihan daya tampung sedangkan batas usia operasi TPA pada umumnya yaitu 30 tahun yang mana berbanding terbalik dengan usia TPA Jatibarang yang hampir 32 tahun.



Gambar 1.3 Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah di Kota Semarang Tahun 2022-2023

Sumber: SIPSN KLHK (2023)

Berdasarkan Gambar 1.3 persentase pengurangan dan penanganan sampah di Kota Semarang mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh peristiwa terbakarnya TPA Jatibarang pada 18 September 2023. Fardaniah (2023) menyebutkan bahwa kebakaran menjadi sebab lain terkait pentingnya penanganan sampah di Kota Semarang. TPA Jatibarang terbakar karena bara api yang masih menyala di tumpukan sampah mengakibatkan kebakaran di zona dua dan zona tiga yang merupakan zona aktif TPA Jatibarang. Bara api tersebut disebabkan oleh gas metana yang berasal dari sampah organik dan sampah anorganik yang rentan terbakar jika terkena panas. Nurkholis, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, menyampaikan bahwa dua lokasi kebakaran di TPA Jatibarang yaitu seluas lima hektar. Kondisi ini berakibat pada terhambatnya proses pengelolaan

sampah sehingga menjadi perhatian bersama dan membutuhkan langkah nyata untuk membantu pengurangan sampah.

Rosa Vivien Ratnawati , Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK, menyampaikan bahwa setelah tahun 2030 tidak akan ada pembangunan TPA, dan pada tahun 2040 tidak akan ada lagi pembangunan TPA (KLHK, 2024). Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah gas metana yang dihasilkan sampah yang berdampak pada iklim. Selain itu, upaya pengelolaan dan pengurangan sampah harus dilakukan seefisien mungkin agar tidak terjadi penimbunan di tempat pembuangan sampah dan berdampak buruk terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Masyarakat sebagai pihak hulu dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah seharusnya semakin sadar terhadap persoalan sampah dengan meminimalkan dampak buruk bagi lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yassindra & Subowo, 2022: 8) menyebutkan penyebab dari volume timbulan sampah di Semarang yang mengalami peningkatan karena adanya peningkatan konsumsi, perubahan pola konsumsi, perkembangan jumlah penduduk, dan peningkatan aktivitas masyarakat. Pemetaan permasalahan menurut Rencana Strategis DLH Kota Semarang tahun 2021-2026 bahwa permasalahan sampah di Kota Semarang disebabkan oleh (1) kurangnya fasilitas penunjang 3R (2) belum ada pemilahan sampah domestik yang baik dan konsisten (3) perilaku membuang sampah dan limbah B3 oleh masyarakat masih dilakukan sembarangan serta (4) rendahnya pengelolaan sampah oleh masyarakat dengan parameter tidak beroperasinya secara efektif bank sampah yang dibangun (Renstra DLH Kota Semarang Tahun 2021-2026).

Aslam, et.al., (2020: 3-9) menyebutkan bahwa peningkatan aktivitas masyarakat berupa pembangunan perkotaan dan penambahan penduduk saling terkait satu sama lain. Lebih lanjut, (Aslam, et.al., 2020: 8) menyebutkan bahwa volume sampah dipengaruhi oleh jumlah penduduk, urbanisasi, dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Saei, 2012) mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah semakin buruk karena faktor-faktor urbanisasi yang tidak terkendali, peningkatan populasi, dan kemajuan ekonomi sehingga mempersulit sektor publik untuk memenuhi harapan masyarakat.

Warsono, dkk. (2023: 1-5) menunjukkan bahwa diperlukan peraturan daerah yang tepat yang mengatur permasalahan misalnya pada target pelayanan pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) di Disdukcapil Banyumanik Semarang. Selaras dengan penelitian tersebut, Astuti (2022: 4) yang menyebutkan bahwa diperlukan peraturan daerah yang tepat dalam mengatur hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, penelitian mengenai ketepatan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum dilaksanakan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam.

Berdasarkan fenomena di atas, dibutuhkan peran DLH Kota Semarang dan TPA Jatibarang menuju ketepatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, perlunya penelitian tentang ketepatan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah oleh DLH Kota Semarang melalui TPA Jatibarang. Hal ini tidak terlepas dari peran penting DLH Kota Semarang dan TPA Jatibarang dalam memberikan kontribusinya melalui pengelolaan sampah dari

sumbernya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Selain sebagai sumber bagi penelitian di masa mendatang terkait dengan topik penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang yang diharapkan dapat memajukan bidang ilmu administrasi publik dengan memberikan rujukan mengenai analisis dan penerapan kebijakan publik.

### 1.4.2 Aspek Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat dijadikan bahan rujukan terkait perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat dijadikan bahan rujukan pada penelitian di masa mendatang mengenai undang-undang pengelolaan sampah yang diberlakukan di Kota Semarang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

#### c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan dapat memperluas pemahaman dan memberikan pengalaman unik bagi mahasiswa yang mempelajari administrasi publik sekaligus mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di masyarakat.

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
<b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN</b>			
1	Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Kota Semarang)  (Ermilinda dkk, 2022)	Mengetahui permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Pengelolaan sampah di Kota Semarang memiliki kesimpulan yaitu kurangnya konsistensi dalam penyampaian informasi dari petugas kepada masyarakat, masih dibutuhkannya sumber daya (staf) yang cukup dan cakap, respons yang baik dari aparat pelaksana belum didukung dengan pemahaman menyeluruh terkait dengan

			pengelolaan sampah, serta masih terdapat tumpang tindih tugas dalam penanganan tugas persampahan.
2	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah  (Amjah dkk, 2022)	Mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak mengalami kendala diantaranya kurangnya komunikasi, sosialisasi, dan pembinaan oleh DLH kepada pemerintahan desa sehingga tidak ada kejelasan instruksi dalam pengelolaan sampah
3	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru)  (Arisandi dkk, 2020)	Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah	DLH Kabupaten Cirebon belum melakukan penyaluran informasi kepada masyarakat secara optimal karena kurangnya sumberdaya yang membantu dalam implementasi kebijakan, dan kurang maksimalnya SOP dalam praktik pengelolaan sampah
4	Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 dalam Program Pemerintah Kota Mojokerto  (Firdaus dkk, 2022)	Mengetahui lebih dalam mengenai program bank sampah sebagai program Pemkot Mojokerto	Bank sampah sebagai program dari Pemkot Mojokerto belum berjalan secara optimal karena pemerintah setempat belum mendukung kelancaran program yang sedang dilaksanakan
5	<i>Public-private partnership in solid waste management sector in the West Bank of Palestine</i>  (Saadeh dkk, 2019)	Mengetahui kondisi pelaksanaan kerjasama PPP di Palestina dalam pengelolaan sampah	PPP di Palestina masih belum berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih kurangnya dukungan dari kementerian dan pemerintah daerah untuk membantu pihak swasta kepada calon kontraktor serta belum berlakunya peraturan perundang-undangan secara optimal.

6	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang  (Novaldi dan Budiati, 2022)	Mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Partisipasi masyarakat belum maksimal karena tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan program pengelolaan sampah dan kurangnya fasilitas penunjang dalam pengelolaan sampah
7	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo  (Reta dkk, 2020)	Mendeskripsikan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Lokasi TPS tidak strategis karena berada di pinggir sungai, kurangnya sarana pengelolaan sampah yang memadai, dan keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurangnya sosialisasi menjadi penghambat implementasi kebijakan
8	<i>Waste management communication policy for effective citizen awareness</i>  (Kala et.al, 2020)	Mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di India	Pengelolaan sampah di India dapat disimpulkan masih membutuhkan perbaikan yang disebabkan oleh kekurangan waktu, kekurangan ruang, dan kekurangan fasilitas serta dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu proses kebijakan berjalan
9	<i>Developing efficient circularity for construction and demolition waste management in fast emerging economies: Lessons learned from Shenzhen, China</i>  (Bao & Lu, 2020)	Mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah melalui ekonomi sirkular	Pengelolaan limbah di Shenzhen sebagai upaya mengembangkan ekonomi sirkular mengalami beberapa kesulitan yang disebabkan oleh pendanaan yang tidak mencukupi, teknologi yang primitif, dan sistem administrasi yang tidak efisien
<b>KETEPATAN KEBIJAKAN</b>			
10	Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan	Menganalisis ketepatan implementasi serta pendorong	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumanik Kota Semarang telah menerapkan kebijakan Kartu Tanda Penduduk (KIA)

	<p>Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang</p> <p>(Thamrin, F. R., Santoso, R. S., &amp; Warsono, H. 2023)</p>	<p>dan penghambat implementasi kebijakan</p>	<p>dengan cukup efektif. Namun, terdapat kekurangan dalam ketepatan kebijakan, pelaksanaan, dan target. Fasilitas dan kolaborasi pihak ketiga menjadi pendorong pelaksanaannya, sedangkan kegiatan sosialisasi, pembatasan KIA, dukungan masyarakat, dan sektor lainnya menjadi penghambat.</p>
11	<p>Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujung Negoro Batang</p> <p>(Aurellita, Djumiarti, &amp; Lituhayu, 2022)</p>	<p>Mengetahui ketepatan implementasi kebijakan serta faktor yang mempengaruhi</p>	<p>Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Pantai Ujungnegoro belum sepenuhnya terlaksana dengan baik berdasarkan teori Riant Nugroho yaitu ketepatan kebijakan belum maksimal yang dipengaruhi oleh keadaan pantai karena banyaknya sampah yang berserakan</p>
12	<p>Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang</p> <p>(Triana, Astuti, &amp; Santoso, 2022)</p>	<p>Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan implementasi kebijakan</p>	<p>Masih terdapat tantangan mengenai ketepatan proses pelaksanaan kebijakan untuk menegakkan hak kerja difabel di Kota Semarang. Sebab, belum ada fungsi pengawasan, belum ada ULD (Unit Pelayanan Disabilitas), juga belum ada peraturan daerah yang mengatur perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota Semarang sendiri.</p>
13	<p>Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Brebes (Studi Smp Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung)</p> <p>(Tyas, Lituhayu, &amp; Widowati, 2022)</p>	<p>Mengetahui proses implementasi dan mengidentifikasi faktor penghambat</p>	<p>Implementasi kebijakan PIP sudah berjalan dengan baik tetapi pada ketepatan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar memiliki permasalahan yaitu belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena awalnya bertujuan untuk menarik siswa yang putus sekolah tetapi lebih memilih untuk bekerja di luar kota</p>

14	Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 tentang Penanganan Sampah)  (Abiyyu, R N., 2023)	Mengetahui ketepatan implementasi kebijakan serta dukungan dan hambatannya	Peraturan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo belum dilaksanakan dengan prosedur, tujuan, atau kebijakan yang tepat. Struktur dan tujuan kebijakan pengelolaan sampah, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dianggap sebagai hambatan dalam implementasinya.
15	Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Mewujudkan Permukiman yang Layak Huni, Produktif, dan Berkelanjutan di Desa Tembuku  (Mitasari dkk, 2023)	Mengetahui proses implementasi Kebijakan	Ketepatan kebijakan masih belum optimal, yaitu pada indikator tepat sasaran dan tepat proses. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hambatan diantaranya tidak semua kawasan kumuh yang ada di Desa Tembuku dapat dijangkau secara menyeluruh melalui dana dari program KOTAKU dan belum adanya pembangunan TPS 3R sesuai dengan perencanaan awal

*Sumber: Olahan Penulis (2023)*

Penelitian-penelitian terdahulu merupakan kerangka acuan yang digunakan sebagai bahan bacaan juga rujukan subjek penelitian, bahan perbandingan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, serta membantu peneliti dalam penyusunan penelitian agar sistematis. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa telah terdapat beberapa penelitian yang berhubungan program Bank Sampah untuk pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peneliti akan mendeskripsikan secara singkat penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, kajian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan menggunakan teori pengaruh implementasi kebijakan menurut Edwards III

(Engkus, 2018) meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori tersebut digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Ermilinda (2022), Amjah dkk (2022), dan Aridansi dkk (2020). Melalui penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa masih ditemui hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yaitu belum adanya SOP pada praktik pengelolaan sampah di Cirebon. Selain itu, persamaan dari penelitian tersebut yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kedua, kajian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan menggunakan teori yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Suparno, 2017) yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan pelaksana, sikap pelaksana, karakteristik badan pelaksana, serta lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang telah digunakan oleh Firdaus dkk (2022) dan Reta dkk (2020) dalam penelitiannya. Kemudian, teori dari Jan Merse yang hasil penelitiannya fokus pada aspek hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah digunakan oleh Novaldi dan Budiati (2022) dalam penelitiannya.

Ketiga, kajian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang menggunakan teori ketepatan implementasi kebijakan Riant Nugroho (2021) meliputi ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target implementasi, lingkungan implementasi, dan proses. Teori tersebut digunakan pada penelitian Thamrin dkk (2023), Aurellita dkk (2023), Triana dkk (2023), Tyas dkk (2022), Abiyyu dkk (2023), dan Mitasari dkk (2023).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Fokus dalam penelitian ini mengenai ketepatan implementasi menggunakan teori 5 ketepatan kebijakan Riant Nugroho untuk menilai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan menggunakan teori kombinasi (gabungan) Edwards III serta Van Meter dan Van Horn.

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Chakrabarty & Chand (2012: 2-3) dalam bukunya yang berjudul "*Public Administration in a Globalizing World*" merangkum beberapa definisi administrasi publik menurut beberapa ahli, berikut ini:

1. Menurut Dimock dan Dimock (1969: 3, 11) administrasi publik dalam pemecahan masalah harus memperhatikan kebijakan publik dan mencapai tujuan masyarakat serta bersifat eksploratif dan inovatif berdasarkan pada pemahaman untuk menyelesaikan masalah kelompok agar lebih efektif.
2. Menurut Wilson (1953: 65-75) administrasi publik sebagai pelaksanaan aturan publik secara rinci dan sistematis. Setiap penerapan aturan publik merupakan tindakan administrasi.
3. Menurut L. D. White (1955: 2) administrasi publik adalah gabungan dari semua undang-undang, peraturan, praktik hukum, dan adat istiadat yang berlaku dalam yurisdiksi mana pun sebagai pelaksanaan kebijakan publik.

4. Menurut Corson dan Harris (1967: i) administrasi publik adalah pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan yang harus dilakukan, perumusan tujuan dan sasaran, serta tindakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan.
5. Menurut Pfiffner dan Presthus (1953: 3) administrasi publik adalah kerja sama individu dan kelompok untuk mengimplementasikan kebijakan publik
6. Menurut Felix A. Nigro (1971: 21) administrasi publik adalah kerja sama dalam lingkungan publik dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, administrasi publik berperan penting dalam menciptakan kebijakan publik untuk pelayanan masyarakat.

Definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerja sama atau kolaborasi dari sekelompok individu di dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan yang memiliki hubungan erat dengan tiga cabang lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai pemerintahan yang baik.

### **1.5.3 Paradigma Administrasi Publik**

Paradigma juga dapat diartikan sebagai suatu pola atau model yang menggambarkan lokus dan fokus administrasi publik. Paradigma adalah sudut pandang seorang ahli yang terbentuk selama evolusi suatu ilmu atau merupakan konsensus beberapa ahli yang bertujuan untuk menghasilkan informasi baru. Setelah itu, paradigma ahli memunculkan sejumlah penelitian yang muncul di masyarakat dan menjadi bukti mendasar keberadaan peradaban. Berikut ini adalah perkembangan paradigma administrasi publik menurut (Ikeanyibe, et.al., 2017: 3-

7) dalam jurnalnya yang berjudul “*Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria*”:

1. Paradigma I: Dikotomi Administrasi Politik (1900–1926)

Paradigma I dikenal sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi untuk menjalankan program secara efektif dan efisien. Paradigma dikotomi politik menyatakan bahwa administrasi terdiri dari politik dan administrasi. Menurut paradigma ini, administrasi dan politik merupakan dua hal yang saling bergantung yang tidak terpisahkan.

2. Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937)

Paradigma II berfokus pada administrasi publik yang memaparkan fungsi serta prinsip manajemen sedangkan lokusnya tidak terperinci yang membuat paradigma ini universal dengan lebih menekankan fokus dibandingkan lokusnya.

3. Paradigma III: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950–1970)

Paradigma ini kembali mengintegrasikan ilmu politik dengan administrasi publik, sehingga memungkinkan lingkungan politik mempengaruhi penerapannya dan mencegahnya menjadi bebas nilai. Menurut paradigma ini, administrasi negara muncul sebagai ilmu politik antara tahun 1950 dan 1970 dalam upaya mengembalikan hubungan konseptual antara ilmu politik dan administrasi negara. Namun, pada tahun 1962 muncul keyakinan baru bahwa administrasi publik adalah ilmu politik yang berpusat pada birokrasi dan administrasi negara tidak lagi dipandang sebagai ilmu politik.

4. Paradigma IV: Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)

Paradigma ini menekankan bahwa administrasi publik tidak meninggalkan lokus dan fokus ilmu pengetahuan sebelumnya, yaitu sebagai ilmu manajemen (Henry, 1975). Administrasi publik sebagai manajemen harus bertahan meskipun akan tergantikan oleh paradigma selanjutnya.

5. Paradigma V: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Secara ilmiah dan menyeluruh, administrasi publik merupakan ilmu administrasi dan prinsip-prinsip manajemen dikembangkan kembali, mencakup perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penggunaan teknologi kontemporer. Administrasi negara dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu ilmu administrasi yang menjelaskan kebijakan publik dan pengembangan ilmu administrasi murni berdasarkan psikologi sosial. Paradigma V menyatakan bahwa administrasi publik kembali pada fokus semula yaitu menggunakan ilmu manajemen dan teori organisasi dalam administrasi publik. Penekanan administrasi publik dan administrasi bisnis identik dalam paradigma ini. Penekanannya masing-masing adalah pada efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

6. Paradigma VI: Tata Kelola (1990–sekarang)

Paradigma ini diketahui sejumlah kelompok masyarakat yang memiliki kewenangan secara langsung berdampak pada hubungan kelembagaan serta kemajuan perekonomian dan masyarakat, melalui pengesahan undang-undang dan penyebarannya. Konsep ini dikenalkan dan diaplikasikan pada akhir 1980-

an dan 1990-an untuk memenuhi syarat aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Secara lebih luas, konsep governansi merupakan tata kelola yang dilakukan oleh antar bagian pemerintah untuk menjalankan sebuah proses pemerintahan demi memajukan sebuah visi misi yang telah ditetapkan di dalam tujuan pembangunan.

Menurut penjelasan paradigma publik atas, penelitian ini menggunakan paradigma kelima yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Hal ini dikarenakan pada paradigma ini memiliki lokus dan fokus yang jelas serta sesuai dengan penelitian ini. Fokus administrasi publik pada penelitian ini yakni melihat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga dapat menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah yang nantinya dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk menangani permasalahan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang.

#### **1.5.4 Kebijakan Publik**

Suwitri, S., dkk. (2014: 5-15) dalam modulnya yang berjudul “*Analisis Kebijakan Publik*” merangkum beberapa definisi kebijakan publik menurut beberapa ahli, berikut ini:

1. James E. Anderson menyebutkan bahwa kebijakan adalah sekumpulan upaya-upaya dengan maksud untuk memecahkan suatu permasalahan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu.

2. Carl J. Friedrich menyebutkan bahwa kebijakan merupakan sekumpulan aktivitas dari gagasan individu, pemerintah, juga organisasi dengan hambatan dan peluang di lingkungan tertentu demi mewujudkan target.
3. Irfan Islamy menyebutkan bahwa publik memiliki arti sebagai umum, rakyat, dan masyarakat. Jika dikaitkan dengan kepentingan maka, publik berkaitan dengan kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan rakyat, atau kepentingan masyarakat.
4. Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Miftah Thoha, 2011:107) adalah segala sesuatu yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Thomas R. Dye menyoroti bahwa segala keputusan yang diambil pemerintah akan menjadi kebijakan.
5. Chandler & Plano (Keban, 2014: 60) memperjelas bahwa kebijakan publik adalah suatu cara untuk menggunakan sumber daya yang ada secara lebih strategis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sudah ada.
6. Kebijakan publik menurut William N. Dunn (Inu Kencana, 2010:106) adalah seperangkat alternatif yang saling berkaitan yang dikembangkan oleh badan atau lembaga pemerintah di bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintahan.
7. Menurut David Easton, kebijakan publik adalah distribusi nilai-nilai yang dipaksakan di antara seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan konstruktif untuk menyelesaikan masalah.
8. Menurut Larry N. Gerston (Irfan Islamy, 2002: 18) kebijakan publik merupakan puncak dari beberapa pilihan, janji, dan perbuatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memerintah.

Berdasarkan definisi kebijakan publik di atas, kebijakan publik adalah sesuatu yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, diterapkan atau tidak diterapkan, yang telah diputuskan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Maka dari itu, penelitian ini akan meninjau implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang khususnya Bab VII Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pasal 24 yang menjelaskan proses penanganan sampah yaitu pemrosesan akhir.

#### **1.5.5 Implementasi Kebijakan Publik**

Di antara tahapan penetapan agenda, perumusan, dan adopsi serta tahapan penilaian berikutnya, terdapat fase implementasi dalam proses kebijakan publik. Menurut Charles O. Jones (Suwitri, 2008: 21) kapasitas untuk membangun hubungan baru dalam rantai sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan, merupakan implementasi kebijakan publik. Melalui keterlibatan beberapa aktor dan kepentingannya yang beragam, implementasi dan hubungannya dengan kebijakan publik memberikan upaya yang mengaitkan tindakan program dengan tujuan/sasaran program yang ingin dicapai (Purwanto & Sulistyastuti, 2015: 12).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Islamy, 2015: 21) pelaksanaan keputusan kebijakan yang mendasar dikenal dengan istilah kebijakan publik dengan hasil dari keputusan-keputusan tersebut adalah undang-undang dan keputusan eksekutif. Menurut Pressman dan Wildavsky (Purwanto & Sulistyastuti, 2015: 20) implementasi kebijakan publik mencakup pelaksanaan, penetapan janji yang tercantum dalam dokumen kebijakan, menghasilkan tujuan kebijakan yang telah

ditentukan di dokumen kebijakan, dan penyelesaian misi yang hendak dicapai oleh tujuan kebijakan. Menurut Grindle (Suparno, 2017: 23) kemampuan suatu kebijakan untuk mengarahkan proses implementasi untuk berhasil bergantung pada jenis kepentingan yang dilayaninya dan bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak pada aktivitas yang terlibat dalam proses tersebut.

Purwanto dan Sulistyastuti (2015: 14) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan publik dapat saja mengalami kegagalan (Hogwood dan Gunn, 1984: 234-245) oleh sebab sebagai berikut:

1. Ada hambatan kondisi eksternal
2. Waktu dan sumberdaya tidak tersedia secara memadai
3. Tidak ada argumen (teoritis) mendasar yang mendukung sebab akibat kebijakan dengan hasil yang akan diwujudkan
4. Jarang sekali terdapat sebab-akibat yang jelas antara kebijakan dan hasil
5. Organisasi pelaksana tidak selalu otonom
6. Para pelaku hampir tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mendiskusikan tujuan kebijakan dan cara mencapainya
7. Kerja sama dan komunikasi yang sempurna jarang bisa dilakukan

Van Meter dan Van Horn (Purwanto & Sulistyastuti, 2015: 19) mengidentifikasi indikator dalam implementasi kebijakan publik a) standar dan tujuan kebijakan b) sumber daya c) komunikasi dan penggunaan paksaan d) disposisi implementor e) karakter lembaga pelaksana f) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Implementasi kebijakan publik dapat berjalan dengan optimal apabila mendapatkan dukungan dari masyarakat yang menjadi objek dari kebijakan yang

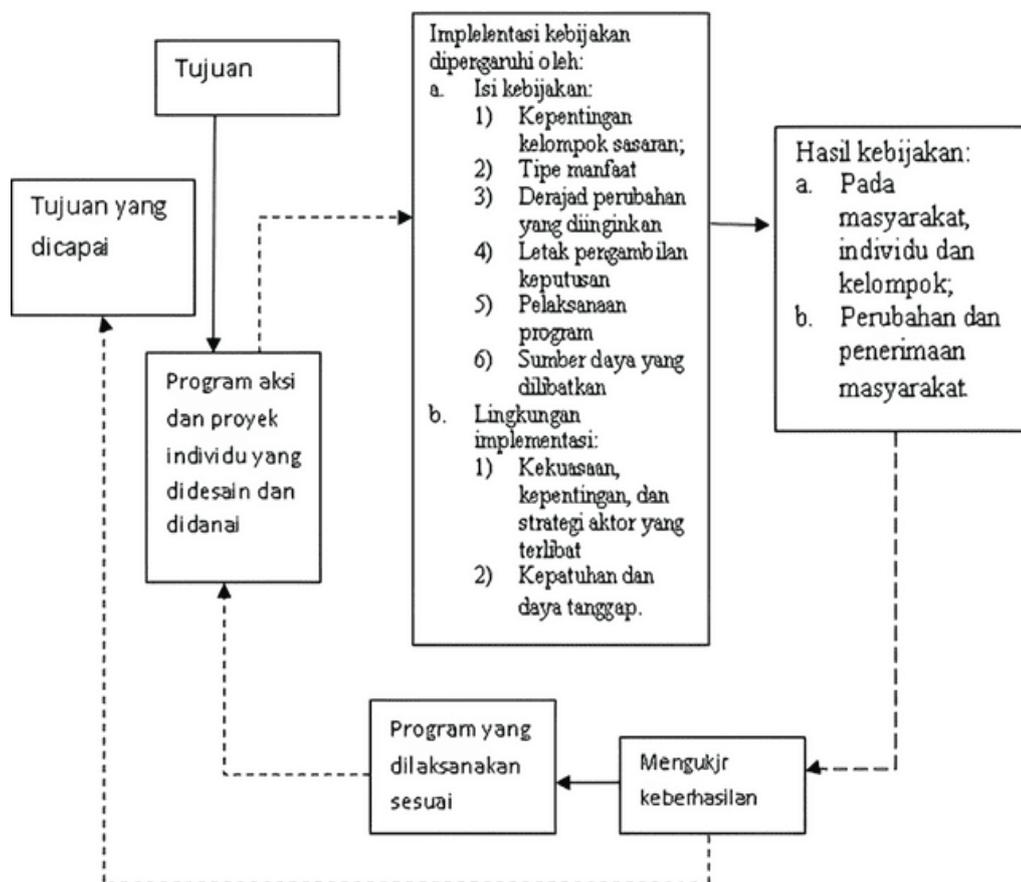
dilaksanakan. Perencanaan implementasi kebijakan yang baik mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan yang akan diimplementasikan.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli di atas, tindakan mengarahkan keluaran kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran dalam rangka mencapai tujuan kebijakan dapat diartikan sebagai implementasi kebijakan publik. Berikut adalah penjelasan model implementasi kebijakan publik menurut (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015: 91-100):

### **1. Model Implementasi Kebijakan Publik Grindle**

Grindle (Suparno, 2017: 29) menyatakan bahwa pemecahan suatu masalah bergantung pada kualitas isi kebijakan dan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan pada pemikirannya yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik untuk mendapatkan peningkatan/perubahan ke arah positif baik kualitas maupun kuantitas. Menurut Grindle (Suparno, 2017: 35) konteks dan isi kebijakan adalah dua fenomena untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Implementasi kebijakan adalah upaya yang harus dilakukan agar kebijakan mencapai tujuannya secara optimal. Tujuan yang telah tertuang di dalam kebijakan publik diimplementasikan melalui program aksi dan berbagai kegiatan melalui indikator keberhasilan program atau kegiatan. Keberhasilan suatu kebijakan dicapai apabila mendapatkan hasil yang diharapkan atau direncanakan melalui dua hal yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi.

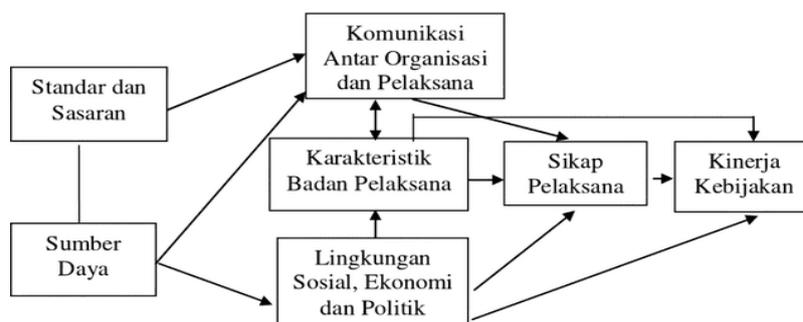


Gambar 1.4 Implementasi Kebijakan Menurut Grindle  
Sumber: Suparno (2017: 29)

Keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada isi kebijakan yang memuat a) kepentingan yang dipengaruhi b) tipe manfaat c) derajat perubahan yang diharapkan d) letak pengambilan keputusan e) pelaksanaan program dan f) sumber daya yang dilibatkan. Dalam implementasinya, kebijakan juga dipengaruhi oleh konteks implementasi yang terdiri atas a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat b) karakteristik lembaga dan penguasa c) kepatuhan dan daya tanggap. Hasil yang dicapai dari implementasi kebijakan yaitu a) dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok b) perubahan dan penerimaan oleh masyarakat.

Lingkungan pelaksana program, pengambilan keputusan, juga sumber daya yang tersedia semuanya berdampak pada seberapa baik kebijakan diimplementasikan. Apabila implementasi kebijakan jauh dari kelompok sasaran maka akan sulit dilakukan karena pelaku kunci dalam kelompok sasaran memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan. Pelaksana kunci memiliki tanggung jawab dalam implementasinya karena jika tidak memiliki kemampuan yang memadai maka implementasi yang dilakukan kurang optimal. Manusia sebagai sumber daya memegang pengaruh penting sebagai objek dalam implementasi kebijakan karena mereka akan bertindak sesuai dengan yang dipahami melalui strategi implementasi.

## 2. Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn



Gambar 1.5 Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn  
Sumber: Suparno, (2017: 32)

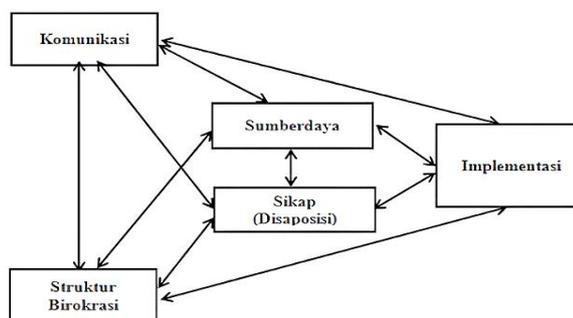
Menurut Van Meter dan Van Horn (Suparno, 2017:32), kinerja kebijakan publik, pelaksana, dan kebijakan berjalan secara linier. Kebijakan publik dipengaruhi oleh a) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi b) karakteristik agen pelaksana/implementor c) kondisi ekonomi, sosial, dan politik d) adanya kecenderungan dari implementator kebijakan. Selain itu Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa ada 6 fenomena yang mempengaruhi hasil implementasi

kebijakan yaitu a) standar dan sasaran kebijakan b) sumber daya c) komunikasi antar organisasi dan pelaksana d) sikap pelaksana e) karakteristik badan pelaksana f) lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Standar dan tujuan kebijakan adalah hal yang krusial dalam implementasi kebijakan, sehingga terdapat beberapa kemungkinan dalam penulisannya. Kemungkinan tersebut yaitu a) dirumuskan secara jelas dan spesifik serta relatif mudah diukur b) tidak dirumuskan secara rinci serta relatif sulit diukur. Tingkat kejelasan standar dan tujuan kebijakan akan menentukan corak respons implementator dalam mengimplementasikan kebijakan. Sebaliknya ketidakjelasan dari standar dan tujuan kebijakan dapat mempengaruhi tingkat pemahaman implementor yang berdampak tercapainya pelaksanaan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn menekankan pada pentingnya implementator (agen pelaksana) sehingga bentuk implementasinya yaitu *top down*. Komunikasi yang digunakan implementator penting diperhatikan karena mempengaruhi respons masyarakat. Implementator memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan standar dan tujuan dari kebijakan yang hendak diimplementasikan. Keberhasilan dan kecenderungan implementator akan mempengaruhi kinerja kebijakan publik yang akhirnya diambil kesimpulan berhasil atau gagal dalam implementasinya.

### 3. Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III



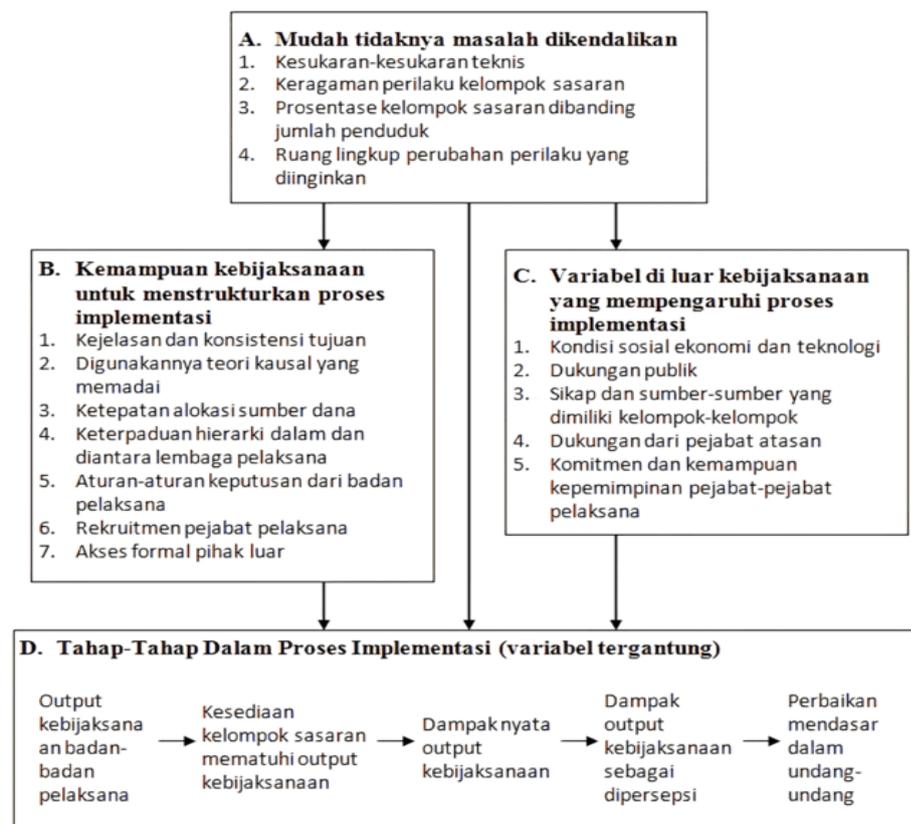
Gambar 1.6 Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III  
Sumber: Agustinus (2006)

Edwards III menyebutkan empat fenomena yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Agustinus, 2006) yaitu:

- a. Fenomena komunikasi mempengaruhi efektivitas kebijakan publik sepanjang pelaksanaannya. Hal ini disebabkan bahwa komunikasi yang efektif diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, yang sangat bergantung pada pengetahuan para pengambil keputusan. Tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi, digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan kebijakan dan peraturan tersampaikan dengan jelas dan akurat.
- b. Fenomena sumber daya mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan kebijakan pemerintah. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya sumber daya untuk menerapkan kebijakan publik, yang berdampak pada organisasi atau lembaga yang melaksanakannya. Sumber daya mencakup manusia, kekuasaan, uang, dan peralatan yang akan berdampak pada penerapan kebijakan tersebut. Indikator dalam fenomena sumber daya yaitu kecukupan staf, informasi pelaksanaan, kewenangan formal, serta fasilitas.

- c. Fenomena sikap atau disposisi mempunyai kaitan dengan kepatuhan para pelaksana terhadap implementasi kebijakan. Kemampuan pelaksana kebijakan untuk menerapkan kebijakan juga terkait dengan fenomena disposisi. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik yang dilaksanakan tanpa adanya kemampuan yang mendukung tidak akan efektif.
- d. Fenomena struktur birokrasi berkaitan dengan kolaborasi dan protokol yang berdampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan publik dapat berjalan lancar dan selaras, diperlukan struktur organisasi yang mendukung, SOP, dan fragmentasi.

#### 4. Model Implementasi Kebijakan Publik Mazmanian dan Sabatier



Gambar 1.7 Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier  
Sumber: Suparno (2017: 40)

Mazmanian dan Sabatier (Suparno, 2017: 40) menyebutkan bahwa implementasi diklasifikasikan ke dalam empat fenomena. Fenomena pertama berkaitan dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang perlu dikelola dengan menggunakan indikator-indikator berikut: a) kesulitan teknik b) beragam karakter sasaran kebijakan c) persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk dan d) ruang lingkup perilaku. Fenomena kedua menggunakan indikator a) kejelasan dan konsistensi tujuan b) penerapan teori sebab akibat yang tepat c) alokasi sumber daya yang akurat d) integrasi hierarki dalam dan antar lembaga pelaksana e) aturan pengambilan keputusan lembaga pelaksana f) perekrutan pejabat pelaksana dan g) akses formal terhadap pihak eksternal, kebijakan mampu menstrukturkan proses implementasi.

Indikator fenomena ketiga antara lain: a) kondisi sosial ekonomi dan teknologi b) dukungan masyarakat c) sikap dan sumber daya kelompok d) dukungan dari pejabat atasan dan e) komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat pelaksana. Tahapan proses implementasi merupakan fenomena yang keempat, indikatornya meliputi: a) keluaran kebijakan lembaga pelaksana b) kesiediaan kelompok sasaran untuk mematuhi keluaran kebijakan c) dampak aktual dari keluaran kebijakan d) dampak yang dirasakan dari keluaran kebijakan dan e) perubahan mendasar terhadap undang-undang. Pada intinya model implementasi kebijakan publik Mazmanian dan Sabatier berfokus pada fenomena yang memiliki pengaruh pada implementasi kebijakan publik.

### **1.5.6 Ketepatan Implementasi Kebijakan Publik**

Nugroho (2021: 51-53) menyebutkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang terpenting yaitu menampilkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan tercermin melalui ketepatan implementasi kebijakan berikut ini:

#### **1. Ketepatan Kebijakan**

Kebijakan yang diambil harus dilihat dari sisi apakah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang nantinya akan dipecahkan. Kebijakannya pun dilihat dari sisi lembaga berwenang pembuat kebijakan dan diformulasikan sesuai sifat permasalahan yang harus ditangani.

#### **2. Ketepatan Pelaksanaan**

Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat melibatkan pemerintah saja, kerja sama antara pemerintah dengan swasta atau masyarakat, dan kerja sama swasta dengan swasta.

#### **3. Ketepatan Target Implementasi**

Ketepatan target mencakup tiga hal berikut ini:

- a. Tujuan intervensi sesuai dengan strategi, kebijakan tersebut tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan intervensi kebijakan lainnya.
- b. Selain dipersiapkan secara alami, sasaran juga dipersiapkan untuk intervensi karena keadaannya mendukung atau bertentangan, harmonis atau sumbang.
- c. Intervensi dalam implementasi kebijakan merupakan hal baru atau modernisasi penerapan kebijakan sebelumnya

#### 4. Ketepatan Lingkungan Implementasi

Terdapat dua lingkungan menurut (Donald J. Calista dalam Nugroho, 2021: 52-53) yang menentukan dalam implementasi kebijakan, berikut ini yaitu:

- a. Kekuatan sumber kewenangan kebijakan, terbentuknya jaringan berbagai kelompok yang terkena dampak kebijakan baik dari masyarakat maupun pemerintah, serta posisi tawar antara pengambil kebijakan dan jaringan yang terlibat dalam implementasinya membentuk lingkungan internal kebijakan.
- b. Kesan masyarakat terhadap kebijakan dan cara penerapannya, penafsiran kebijakan oleh lembaga-lembaga berpengaruh di masyarakat, dan individu yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap penafsiran dan penerapan kebijakan membentuk lingkungan eksternal kebijakan.

#### 5. Tepat Proses

Implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses, yaitu:

- a. *Policy acceptance*, kebijakan dipandang masyarakat sebagai suatu aturan yang dibutuhkan di masa mendatang sedangkan bagi pemerintah sebagai tugas diselesaikan;
- b. *Policy adoption*, pengambilan kebijakan dipandang masyarakat sebagai suatu aturan yang dibutuhkan di masa mendatang sedangkan bagi pemerintah sebagai tugas diselesaikan;
- c. *Strategic readiness*, kebijakan membuat masyarakat siap berpartisipasi sedangkan bagi pemerintah sebagai pelaksana.

### **1.5.7 Pemilihan Model Implementasi Kebijakan Publik berdasarkan**

#### **Pemetaan Model**

Febriyanti (2017: 39) menyatakan dengan adanya pemahaman model-model implementasi kebijakan, dapat dilakukan adanya pemetaan model implementasi. Model kebijakan *top down* memiliki pola sebagai kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah sedangkan *bottom up* dilaksanakan rakyat dan dibuat pemerintah. Dari kedua model tersebut, ada koneksi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori kombinasi dari Edwards III & Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang.

Teori kombinasi (gabungan) dari Edwards III & Van Meter dan Van Horn digunakan dalam penelitian ini karena memiliki fenomena yang selaras untuk menilai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pengelolaan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang. Teori dari kedua ahli tersebut jika dikombinasikan (digabungkan) dapat melengkapi satu sama lain sehingga saling mendukung fenomena yang hendak dicari di dalam penelitian ini.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi menyangkut transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang diperlukan oleh antar instansi dalam implementasi kebijakan. Pengelolaan sampah di TPA Jatibarang berlandaskan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24 tentang Penanganan Sampah yaitu pemrosesan akhir. Penelitian ini, akan melihat terkait pemahaman TPA Jatibarang Kota

Semarang dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah pada tahapan pemrosesan akhir.

## **2. Sumber daya**

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan didukung dengan adanya potensi pemanfaatan sumber daya yang ada. Penelitian ini, akan melihat sumber daya menyangkut badan atau lembaga implementator yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24 tentang Penanganan Sampah yaitu pemrosesan akhir di TPA Jatibarang.

## **3. Standar dan sasaran kebijakan**

Agar dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, standar dan sasaran kebijakan harus tepat dan dapat diukur. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan yang dicapai TPA Jatibarang, penelitian ini akan melihat tujuan dan standar kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dilandaskan pada Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24 tentang Penanganan Sampah yaitu pemrosesan akhir.

## **4. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi**

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan lingkungan eksternal dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Penelitian ini akan melihat lingkungan eksternal tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24 tentang Penanganan Sampah yaitu pemrosesan akhir.

### 1.5.8 Sampah

Sampah adalah hasil kegiatan dan tindakan manusia yang biasanya tidak terpakai kembali tetapi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Menurut (Kemenkes RI, 2019: 7) sampah adalah suatu bahan atau benda buangan baik berupa padat, semi padat, atau cair dari kegiatan makhluk hidup (manusia dan hewan) yang dapat digunakan kembali melalui proses pemilahan karena akan menjadi resiko bagi lingkungan.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah membuktikan kemajuan, perkembangan, juga bertambahnya penduduk beriringan dengan mengubah media pembungkus makanan masyarakat menimbulkan bertambahnya timbulan sampah akan beragam jenis dan karakteristiknya. Definisi sampah menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia juga proses alam. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mendefinisikan sampah adalah segala sesuatu dari aktivitas manusia yang tidak digunakan dan sengaja dibuang.

Dari definisi para ahli mengenai sampah dapat disimpulkan bahwa sampah adalah semua buangan yang dihasilkan dari kegiatan individu yang berdampak pada kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia. Pasalnya, jumlah volume sampah akan meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan penyakit yang ditimbulkan juga akan bermunculan.

Hadiwiyoto (Kuncoro Sejati, 2009: 8) mengatakan bahwa ada beberapa jenis sampah berdasarkan pada komposisi, bentuk, lokasi, proses, sifat, dan jenis.

Namun, sebagian besar masyarakat, terdapat tiga jenis sampah yang diketahui berikut ini:

### **1. Sampah Organik/Basah**

Sampah organik adalah sampah sisa-sisa rumah tangga yang memiliki kadar air dan mengalami pembusukan sehingga cocok digunakan sebagai campuran pupuk kompos. Jenis sampah ini mudah mengalami penguraian di tanah karena sifatnya yang alamiah dan ramah terhadap lingkungan karena hasil sisa zat-zatnya mudah terdegradasi yang akan diserap tanah dengan memberikan kesuburan. Contoh dari jenis sampah ini yaitu dedaunan, sampah dapur, sampah sisa makanan tempat makan, sisa sayuran, dan sisa buah.

### **2. Sampah Anorganik/Kering**

Sampah anorganik adalah sampah dari kegiatan individu yang bersifat kering yang tidak mudah terurai oleh alam karena membutuhkan waktu yang lama untuk proses penguraian ke tanah. Sampah ini berasal dari bahan kering yang digunakan oleh manusia seperti sampah pembungkus makanan, yang semakin meningkat dengan pola konsumsi manusia untuk makan dengan sistem bawa pulang (*take away*). Contoh dari jenis sampah ini diantaranya plastik, kardus, botol, kertas, logam, besi, karet, dan lain sebagainya yang bersifat kering.

### **3. Sampah Berbahaya**

Seperti namanya, sampah jenis ini memiliki ancaman bahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan apabila dengan tidak sengaja/sengaja dibuang secara sembarangan di tempat umum, misalnya sampah sisa aktivitas medis rumah sakit dan klinik.

Timbulan sampah yang ada di lingkungan sekitar dapat berasal dari beberapa sumber menurut (Wahyono & Sudarno, 2012: 8), yaitu:

1. Pemukiman Penduduk

Mayoritas, sampah perumahan dihasilkan oleh penduduk kota atau penduduk desa antara lain sampah kering, sampah basah, sampah furnitur, sisa makanan, dan sampah tanaman.

2. Tempat Umum dan Tempat Perdagangan

Tempat umum adalah tempat berkumpulnya individu untuk melakukan kegiatan misalnya perdagangan dengan sampah yang dihasilkan diantaranya abu hasil pembakaran dan sisa makanan.

3. Industri Berat dan Ringan

Sisa-sisa bangunan, limbah khusus, limbah B3, limbah basah, dan sampah kering merupakan sampah kegiatan industri.

4. Pertanian

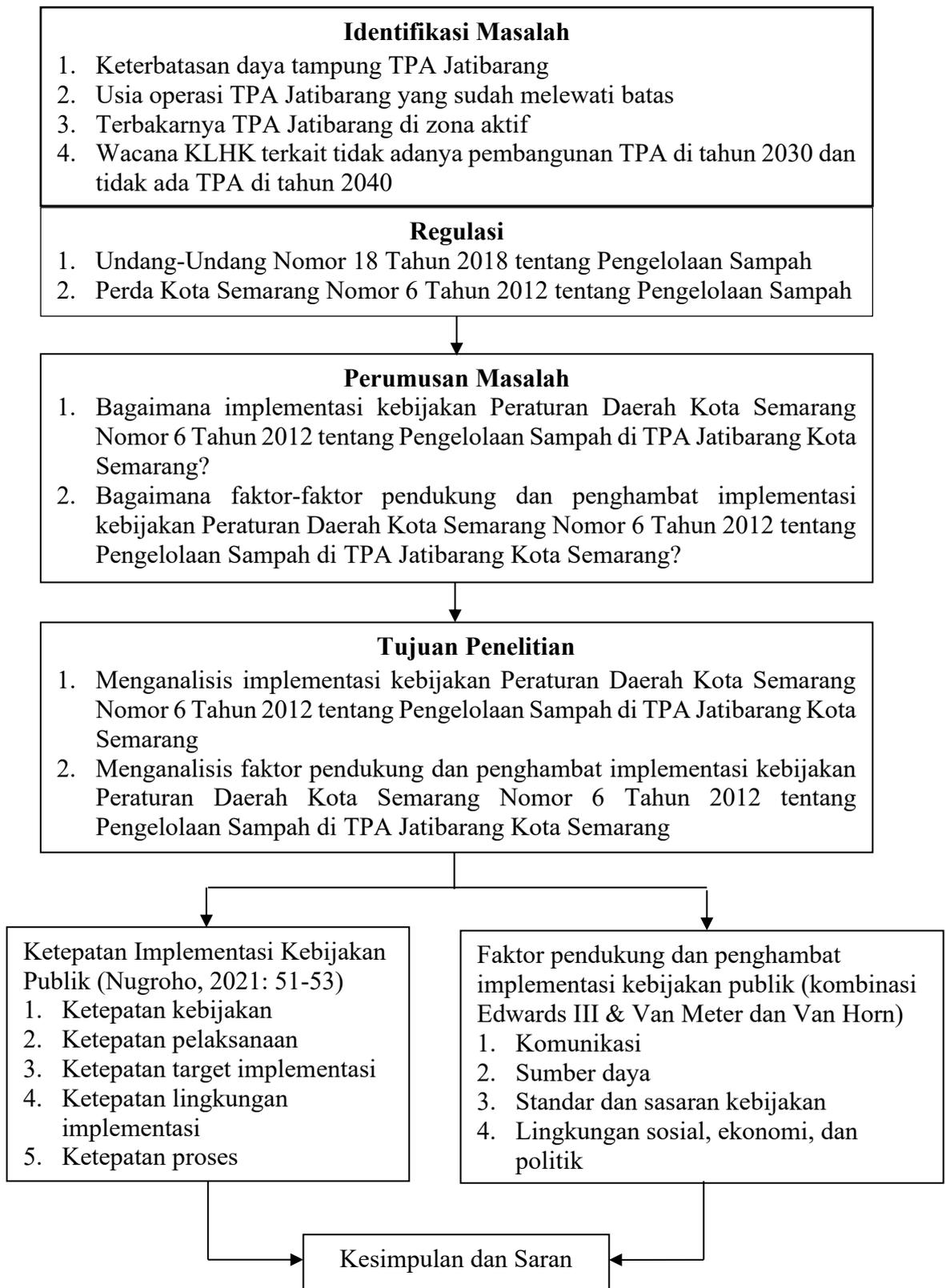
Pupuk, tumbuhan dan hewan mati, makanan busuk, dan obat nyamuk dapat ditemukan di area pertanian.

Pengelolaan sampah dilakukan sebagai upaya mengatasi dampak buruk terhadap lingkungan dan manusia. Sampah jika tidak segera dikelola, akan menjadi tempat berkembangbiaknya organisme penyebab penyakit dan menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan. Pengelolaan sampah mutlak dilakukan seiring dengan bertambahnya penduduk dan aktivitas konsumsi manusia yang bervariasi. Pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu untuk menurunkan risiko yang berdampak dan berasal dari berbagai sumber.

Proses pengelolaan sampah yang sudah dilakukan di Indonesia pada umumnya langsung diangkut menuju TPA tanpa melalui pemilahan dan pengolahan di TPS sehingga hal tersebut akan memberikan dampak lebih bagi alam. Sisa sampah atau residunya diproses dengan cara ditimbun menggunakan metode *sanitary landfill* yang menghasilkan abu yang dimanfaatkan sebagai campuran bahan pembuatan batako atau kompos (Modul Pengolahan Sampah, hal. 89).

Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang tercantum dalam Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk melestarikan lingkungan melalui pengurangan jumlah dan dampak yang dihasilkan sampah. Pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dijelaskan di dalam Pasal 24 tentang Penanganan Sampah yaitu pemrosesan akhir sampah.

## 1.6 Kerangka Pikir Penelitian



## **1.7 Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang**

Penelitian ini meneliti konsep implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang”. Implementasi kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui sebuah keputusan. Gejala implementasinya berkaitan dengan isi kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24 tentang Penanganan Sampah yaitu pemrosesan akhir.

Merujuk pada Pasal 24 yang telah dijabarkan sebelumnya, maka fenomena Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang dengan menggunakan teori lima ketepatan dari Riant Nugroho sebagai berikut:

1. Ketepatan kebijakan
  - Kesesuaian isi kebijakan tentang permasalahan sampah di hilir yang hendak diselesaikan
2. Ketepatan pelaksanaan
  - Peran TPA Jatibarang Kota Semarang
3. Ketepatan target
  - Tercapainya target pengurangan sampah di TPA Jatibarang

4. Ketepatan lingkungan
  - Hubungan antara TPA Jatibarang dengan stakeholders
  - Masyarakat sekitar TPA Jatibarang
5. Ketepatan proses
  - Strategi pelaksanaan kebijakan

#### **1.7.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang**

Teori kombinasi dari teori Edwards III & Van Meter dan Van Horn digunakan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat, berikut ini:

1. Komunikasi
  - Transmisi
  - Kejelasan
  - Konsistensi
2. Sumber daya
  - Sumber daya manusia TPA Jatibarang Kota Semarang
  - Sumber dana
  - Sarana dan prasarana penunjang
  - Lingkungan
3. Standar dan sasaran kebijakan
  - Standar operasional prosedur
  - Sasaran kebijakan

## 4. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

- Lingkungan sosial
- Lingkungan ekonomi
- Lingkungan politik

Tabel 1.2 Fenomena Penelitian

<b>Fenomena</b>	<b>Sub fenomena</b>	<b>Gejala yang diamati</b>	<b>Narasumber</b>
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang	Ketepatan kebijakan	Kesesuaian isi kebijakan tentang permasalahan sampah di hilir yang hendak diselesaikan	1. Kepala UPTD TPA Jatibarang 2. Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPA Jatibarang 3. Pengadministrasi Umum UPTD TPA Jatibarang 4. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana UPTD TPA Jatibarang 5. Pramur Kebersihan UPTD TPA Jatibarang
	Ketepatan pelaksanaan	Peran TPA Jatibarang Kota Semarang	
	Ketepatan target	Tercapainya target pengurangan sampah di TPA Jatibarang	
	Ketepatan lingkungan	a. Hubungan antara TPA Jatibarang dengan stakeholders b. Masyarakat sekitar TPA Jatibarang	
	Ketepatan proses	Strategi pelaksanaan kebijakan	
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang	Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi	
	Sumber daya	a. Sumber daya manusia TPA Jatibarang Kota Semarang b. Sumber dana c. Sarana dan prasarana penunjang d. Lingkungan	
	Standar dan sasaran kebijakan	a. Standar operasional prosedur b. Sasaran kebijakan	
	Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik	a. Lingkungan sosial b. Lingkungan ekonomi c. Lingkungan politik	

## **1.8 Argumen Penelitian**

Argumen penelitian menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan teori-teori yang digunakan di dalam literatur bacaan juga dibangun berdasarkan kerangka pemikiran teoritis. Dalam implementasinya, angka timbulan sampah di TPA Jatibarang masih tinggi yang dibuktikan dengan data volume masuk sampah yang dihimpun. Kondisi ini disebabkan karena pola perubahan konsumsi masyarakat dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah masih kurang sehingga mempengaruhi daya tampung TPA Jatibarang dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya implementasi pengelolaan sampah dengan pembuat kebijakan, kelompok sasaran, hingga kelompok kepentingan. Permasalahan sampah yang belum tertangani secara optimal membuat Pemerintah Daerah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah untuk mengurangi jumlah juga dampak jangka panjang akibat produksi sampah, sehingga kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup dapat terjaga.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tidak mengandalkan perhitungan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengajukan pertanyaan melalui wawancara untuk pengumpulan data dari informan, melakukan analisis data, dan transkrip data menjadi tulisan. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif untuk mengetahui gejala sosial dan perbandingan fenomena yang telah ditulis terkait

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang.

### 1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil situs penelitian di TPA Jatibarang Kota Semarang sesuai dengan arahan dari DLH Kota Semarang.

### 1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* yang dilakukan melalui pertimbangan informasi yang dapat memberikan data yang mendukung permasalahan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang, yang berjumlah lima informan yaitu:

Tabel 1.3 Subjek Penelitian

No	Informan	Karakteristik
1	Kepala UPTD TPA Jatibarang	Bertanggung jawab langsung kepada Kepala DLH Kota Semarang atas pengelolaan sampah di TPA Jatibarang
2	Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPA Jatibarang	Bertanggung jawab atas manajemen di TPA Jatibarang meliputi SDM dan seluruh kegiatan
3	Pengadministrasi Umum UPTD TPA Jatibarang	Bertanggung jawab atas persuratan yang berhubungan dengan kerjasama pihak luar
4	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana UPTD TPA Jatibarang	Bertanggung jawab atas kepemilikan dan inventarisasi aset yang dimiliki oleh TPA Jatibarang
5	Pramu Kebersihan UPTD TPA Jatibarang	Bertanggung jawab atas pemeliharaan kantor dan aset

### 1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa tulisan dan bukan angka yang dikumpulkan dengan bermacam teknik yaitu analisis dokumen, observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut menggambarkan dan mempresentasikan kondisi penelitian dan permasalahan di lapangan.

1. Kata-kata atau ucapan yang disampaikan dan diperoleh langsung melalui wawancara atau penuturan lisan oleh informan di TPA Jatibarang menjadi jenis data utama dalam penelitian ini.
2. Sumber tertulis diperoleh dari dokumen, jurnal, dan peraturan mengenai implementasi kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang sebagai bahan untuk memperkaya informasi dalam penelitian ini.
3. Foto atau gambar dalam penelitian di TPA Jatibarang diambil melalui tahapan observasi yang digunakan sebagai pendukung dan bukti bahwa penelitian telah dilaksanakan.

#### **1.9.5 Sumber Data**

Penelitian ini, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer (langsung) didapatkan melalui proses wawancara dengan informan yang dijelaskan di dalam subjek penelitian. Data primer juga didapatkan melalui observasi secara langsung di TPA Jatibarang yang didampingi dengan Sub Bagian Tata Usaha TPA Jatibarang. Data sekunder (tidak langsung) didapatkan melalui data-data dari dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian dianalisis. Dokumen yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, Renstra DLH Kota Semarang Tahun 2021-2026, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi terstruktur yang dilakukan dengan persiapan sistematis mengenai objek yang diteliti. Observasi dilakukan dalam kurun waktu dua bulan dengan waktu yang fleksibel.
2. Wawancara terstruktur yang dilakukan dengan menggunakan interview guide yang telah disusun. Wawancara dilakukan dalam kurun waktu dua bulan 52-53 menyesuaikan jadwal dari para informan.
3. Dokumen yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, Renstra DLH Kota Semarang Tahun 2021-2026, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian ini menggunakan analisis dan interpretasi data (Sugiyono, 2013: 123) sebagai berikut ini:

1. Pengumpulan data dilakukan guna mendapatkan data yang sesuai terhadap kebutuhan penelitian yang dianalisis menggunakan teknik kualitatif menggunakan observasi dan wawancara dengan informan di TPA Jatibarang
2. Reduksi data digunakan untuk proses pemilihan dan penyederhanaan data lapangan yang diringkas dari jawaban wawancara narasumber di TPA Jatibarang. Reduksi data memberikan gambaran hasil penelitian secara tajam sehingga memudahkan dalam melakukan analisis data

3. Penyajian data dalam bentuk deskripsi tulisan, tabel, grafik, dan diagram untuk memperjelas data dari TPA Jatibarang
4. Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan dan bersifat sementara yang telah dilakukan di TPA Jatibarang

#### **1.9.8 Kualitas Data**

Sugiyono (2013: 241-242) menyebutkan bahwa teknik triangulasi adalah pengumpulan data dengan penggabungan sumber dan cara pengambilan data. Triangulasi dalam penelitian dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi terstruktur dan wawancara terstruktur di TPA Jatibarang serta dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk pengumpulan dan mendapatkan data dengan karakteristik yang sama.